

**TESIS**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BANYAK ORANG  
Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Magister Ilmu  
Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas**



**OLEH:  
VANANDA PUTRA, S.H  
NIM : 1920112026**

**DOSEN PEMBIMBING:**

- 1. Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H.**
- 2. Prof. Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.Hum.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
TAHUN 2023**

## ABSTRAK

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BANYAK ORANG Pada Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg**

**Vananda Putera, 1920112026, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas  
Hukum, Universitas Andalas, 125 hlm, 2023.**

Maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia, dan amat berbahayanya dampak yang ditimbulkan, bahkan dapat meluluhkan pilar-pilar sosio budaya, politik, moral, dan tatanan hukum keamanan nasional, maka sejatinya untuk menanggulangi perbuatan tercela tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang luar biasa, sehingga layak apabila dikatakan bahwa tindak pidana korupsi termasuk ke dalam *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa). Tindak Pidana Korupsi seringkali dilakukan bersama-sama, hukum pidana sudah mengatur tindak pidana bersama-sama melakukan atau yang disebut penyertaan (*deelneming*). Namun seringkali dalam pembuktian tindak pidana korupsi, JPU tidak mengembangkan tentang adanya pelaku lain yang dapat diminta pertanggungjawaban. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah bentuk kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masing-masing pelaku dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh banyak orang (Studi Kasus Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg 2) Bagaimanakah Pembuktian Dalam Kasus Korupsi yang dilakukan oleh banyak orang pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg. 3) Bagaimanakah Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg ?. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan konseptual (*conseptual approach*), dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, konsep tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama dalam pidana korupsi, yaitu jika dalam terwujudnya tindak pidana korupsi itu dilakukan lebih dari satu orang atau dua orang lebih yang secara bersama-sama memiliki maksud atau keinginan untuk terwujudnya perbuatan tersebut. Kesimpulan pada penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Tinggi Padang sudah tepat, karena menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Nomor 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg, akan tetapi pertanggungjawaban dari pelaku lain yang ikut serta dalam tindak pidana korupsi pada kasus ini, tetap tidak dimintai pertanggungjawaban.

**Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Korupsi, Penyertaan (*Deelneming*).**

## **ABSTRACT**

### **CRIMINAL RESPONSIBILITY AGAINST PERSONS OF CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION COMMITTED BY MANY PEOPLE In Decision Case Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg**

*Vananda Putra, 1920112026, Master of Law Study Program, Faculty of Law,  
Andalas University, 125 page, 2023.*

*The rise of criminal acts of corruption in Indonesia, and the very dangerous impacts they cause, can even destroy the socio-cultural, political, moral and legal pillars of national security, so in reality overcoming these disgraceful acts must be done in extraordinary ways, So it is appropriate to say that criminal acts of corruption are included in extraordinary crimes. No. Corruption is often committed jointly, criminal law already regulates criminal acts of joint conduct or what is called participation (deelneming). However, often in proving criminal acts of corruption, the prosecutor does not develop the existence of other perpetrators who can be held accountable. The problems in this research are 1) What is the form of error and criminal responsibility of each perpetrator in criminal acts of corruption committed by many people (Case Study Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg 2) How is the Evidence in the Case Corruption committed by many people in Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg. 3) What are the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 6/Pid.Sus.TPK/2023/PT.Pdg? This type of research is normative juridical research, using a statutory and conceptual approach, with primary and secondary data collection techniques. Based on the results of research and discussion, the concept of criminal acts committed jointly in corruption crimes is if the criminal act of corruption is committed by more than one person or two more people who together have the intention or desire for the act to be carried out. The conclusion of this research is that the decision of the Padang High Court is correct, because it strengthens the decision of the Corruption Crime Court at the Padang District Court Number 46/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Pdg, but the responsibility of other perpetrators who participated in the crime corruption in this case, still not held accountable.*

*Keywords: Criminal Liability, Corruption, Inclusion (Deelneming).*